

ANALISIS KESIAPAN PEMBUDIDAYA KJA DAN PEMBENIH HSRT KOMODITAS IKAN KERAPU DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PENDEKATAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*

Nanda Widaninggar dan Hamzah Fansuri Yusuf
STIE Mandala Jember
Email : nanwiedha@stie-mandala.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku dalam kesiapan menghadapi perdagangan bebas pada komoditas Ikan Kerapu dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Populasi penelitian adalah seluruh pembudidaya KJA dan pembenih HSRT di Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur ini, dilakukan secara kuantitatif, dengan menyebar quesioner, menggunakan metode *Structural Equation Modelling*. Berdasarkan analisis dengan menggunakan SEM, diperoleh hasil bahwa konstruk SDM berpengaruh terhadap *perceived control behavior*, Teknologi berpengaruh terhadap *subjective norm*, dan Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berpengaruh terhadap ketiga variabel intervening pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas. Sedangkan konstruk Regulasi berpengaruh terhadap *perceived control behavior* dan Resistensi berpengaruh terhadap *attitude toward*. Satu-satunya konstruk yang berpengaruh terhadap ketiganya pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah Pembiayaan Lembaga Keuangan Formal. Nilai tertinggi yang mempengaruhi *Intention* Kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah *Subjective Norm*.

Kata kunci: Kesiapan dalam menghadapi Perdagangan Bebas, *Attitude Toward*, *Subjective Norm*, *Perceived Control Behavior*

Abstract

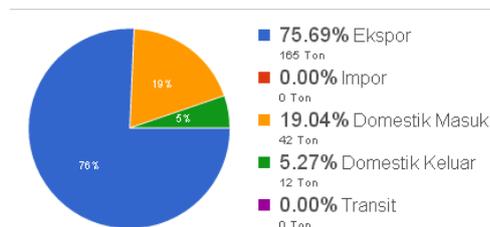
The study aimed to analyze and review Test factors affecting the intention to review the readiness to behave hearts Facing Free Trade Commodities ON WITH Groupers using Theory of Planned Behavior. The entire study population cultivators BY KJA And pembenih HSRT in Situbondo, East Java Province Singers, conducted quantitative Operates, WITH spread questionnaires, using Method of Structural Equation Modelling population of 114 farmers Fishermen KJA And pembenih HSRT, distributed questionnaires a total of 70 copies, And The Back And can be processed a number of 43 copies. Based WITH analysis using SEM, TIN findings that affect human constructs against perceived behavioral control, subjective Against influential technology norms, and Commitment Marine and Fisheries Agency Against Third influential NOT IN readiness intervention variable hearts Facing Free Trade. While constructs Regulation Against the influence of perceived control of behavior and attitudes affect the resistance against directions. The only constructs The influential Against three hearts IN readiness Facing Free Trade Financing Is a Formal Financial Institutions. Highest rated affecting intention hearts Readiness Facing Free Trade Is a Subjective Norm.

Keywords: *Attitude Toward*, *Perceived Control Behavior*, readiness in the face of free trade, *Subjective Norm*.

PENDAHULUAN

Seiring diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016, mendorong semua sektor perekonomian dan perdagangan untuk berbenah diri. Pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Asean akan merasakan dampak perdagangan bebas dalam lingkup negara-negara Asean, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, Myanmar, dan Filipina. Pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dinilai berhasil dalam pengembangannya, sehingga dipercaya sebagai kepala MEA Center, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kerjasama negara-negara Asean, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi agar tercapai harmonisasi standar produk barang dan jasa serta proses produksi di sektor kelautan dan perikanan.

Isu ketahanan pangan merupakan salah satu masalah utama masyarakat di dunia, dan bagi Indonesia, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketersediaan produksi pangan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan sector andalan Indonesia untuk perdagangan luar negeri, menurut data BKIPM KKP, volume ekspor produk perikanan mati sebanyak 59.998,97 ton. Sedangkan Balai KIPM Kelas 1 Surabaya mencatat total volume ekspor sebanyak 218,51 ton ekspor dari Balai KIPM Kelas 1 Surabaya. Dari sejumlah itu volume ekspor Kerapu menyumbang 1,17% atau 2,56 ton pada bulan April 2016 (www.bkipm.kkp.go.id, diakses pada tanggal 19 April 2016). Berikut ini grafik ekspor impor dari BKIPM Kelas 1 Surabaya:



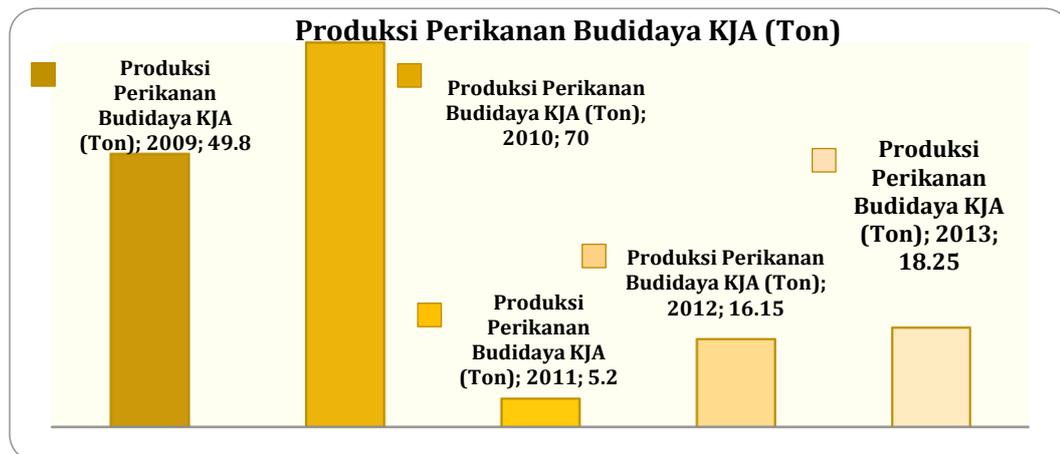
Gambar 1. Grafik ekspor impor KIPM kelas 1 Surabaya pada Bulan April
Sumber: data BKIPM KKP diakses tanggal 19 April 2016

Tabel 1. Data ekspor produk perikanan mati Balai KIPM kelas 1 Surabaya pada Bulan April 2016

	UPT	Produk	E	I	M	K	T	Vol. Total (Ton)	% Vol. Total
1	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Sarden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45,66 %
2	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Ikan Segar	50,42	0,00	0,08	0,63	0,00	51,13	23,35 %
3	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Udang Windu	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	25,15	11,49 %
4	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Kekerangan	7,44	0,00	0,00	8,73	0,00	16,16	7,38%
5	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Rajungan	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	9,38	4,28%
6	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Teripang	3,43	0,00	0,35	0,47	0,00	4,24	1,94%
7	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Ikan Kerapu	0,41	0,00	2,15	0,00	0,00	2,56	1,17%
8	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Ikan Kakap	0,04	0,00	2,28	0,00	0,00	2,32	1,06%
9	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Udang	1,85	0,00	0,45	0,00	0,00	2,30	1,05%
10	Balai KIPM Kelas I Surabaya I	Udang Putih	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,42%

Sumber: data BKIPM KKP diakses tanggal 19 April 2016

Salah satu daerah yang berhasil dalam pengembangan produksi ikan adalah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kabupaten yang memiliki garis pantai sepanjang ±150 km ini terletak di bagian utara Jawa Timur dengan perairan yang tenang (Situbondo dalam angka 2015). Melalui lembaga BBAP, kabupaten ini sukses membudidayakan Udang Vannamei dan Ikan Kerapu, sehingga masyarakat dapat ikut serta merasakan manfaatnya, terbukti dengan peningkatan jumlah usaha pembenihan (*hatchery*) dan *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) Ikan Kerapu di Kabupaten Situbondo. (http://bit.ly/copy_win diakses tanggal 15 Desember 2014). Usaha budidaya air laut (*marine culture*) yang dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah budidaya Ikan Kerapu dan rumput laut. Jenis ikan yang dipelihara di KJA antara lain Kerapu Tikus (*Cromileptes Altivelis*) dan Kerapu Macan (*Epinphelus Fuscoguttatus*), yang dimulai tahun ini seluruh jenis Ikan Kerapu akan disamakan penamaannya menjadi Ikan Kerapu. Berikut ini data produksi budidaya perikanan laut pada Keramba Jaring Apung (KJA) 2009-2013:



Gambar 2. Grafik produksi perikanan budidaya keramba jaring apung 2009-2013

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo, data diolah

Budidaya perikanan Keramba Jaring Apung ini menjadi penting karena perdagangan Ikan Kerapu ini dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil devisa potensial karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi di perdagangan internasional. Selain itu, dengan adanya lembaga yang meneliti budidaya Ikan Kerapu ini, maka modernisasi penangkapan dan budidayanya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut, seperti rusaknya terumbu karang.

Perdagangan komoditas Ikan Kerapu ini sangat menjanjikan, khususnya dalam menghadapi MEA pada akhir tahun 2015, karena berdasarkan data FAO tahun 2011, konsumsi ikan masyarakat dunia adalah sebanyak 130,8 juta ton. Jumlah konsumsi ikan tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,4% selama kurun waktu lima tahun terakhir (PPUK-BI, 2013). Sementara konsumsi ikan hasil budidaya meningkat 10 kali lipat semenjak tahun 1970, dengan rata-rata tahunan mencapai 6,6% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan *trend* dan *lifestyle* masyarakat dunia untuk mengkonsumsi ikan. Akan tetapi, peningkatan konsumsi ikan masyarakat dunia tersebut berbanding terbalik dengan kondisi cadangan ikan dunia yang terus tergerus oleh praktek eksploitasi perikanan. Menurut PPUK-BI (2013), pada tahun 2009, 57,4% sumber daya perikanan alami (perikanan tangkap) dunia sudah tereksplorasi maksimal dan tidak ada ruang untuk meningkatkan produksi. Hal ini didasarkan pada data ikan tangkap dari alam yang mencapai 90,4 juta ton pada tahun 2011, yang mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2010. Oleh karena itu fokus pemerintah pada pengembangan budidaya perikanan tidak dapat dielakkan lagi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dunia, budidaya perikanan telah mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir dan mengalami kenaikan sebesar 6,2% pada tahun 2011.

Menurut Ditjen Perikanan Budidaya KKP (2013), Indonesia harus menjadi pusat inovasi budidaya ikan, khususnya Ikan Kerapu, dengan alasan sebagai berikut:

1. Budidaya laut di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya pesat, bahkan untuk Ikan Kerapu, jumlah produksi pada tahun 2012 mencapai 10.200 ton,
2. Pemanfaatan lahan di laut untuk budidaya masih sangat kecil, hanya 3,69% dari total luas lahan sebesar 4.580.000 Ha. Untuk wilayah Situbondo, potensi geografis/alamnya yang memiliki garis pantai kurang lebih sepanjang 150 km, mendorong peluang pengembangan budidaya Ikan Kerapu,
3. Permintaan dunia cenderung meningkat yaitu sebesar 35.000 ton per tahun, sedangkan jumlah produksi ikan Indonesia jika seluruhnya diekspor, tidak sampai 30% dari total permintaan perdagangan dunia,
4. Harga Ikan Kerapu yang tinggi, yaitu pada kisaran US\$ 25 - US\$ 125,
5. Tingkat keberhasilan pembenihan dan budidaya cenderung meningkat sedangkan teknologinya sudah dikuasai,
6. Berkembangnya pembenihan skala besar dan kecil/HSRT,
7. Adanya sentra pembenihan kerapu, yang salah satunya berada di Kabupaten Situbondo.

Dengan modal dasar tersebut, ditambah dengan semakin terbukanya perdagangan perdagangan melalui MEA 2015, maka peluang untuk menjadikan Ikan Kerapu sebagai komoditas utama bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo menjadi semakin nyata. Pemerintah pusat juga semakin nyata dalam dukungannya untuk mempercepat pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2016. Dalam peraturan ini diatur mengenai jumlah dan frekuensi kapal pengangkut ikan hidup yang selama ini menjadi masalah, kapasitas kapal angkut, dan mengenai alat tangkap yang mendukung pelestarian lingkungan. Peraturan ini juga dikeluarkan untuk mencegah *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Dalam meningkatkan pengembangan perikanan budidaya kerapu diperlukan kerjasama yang terintegrasi oleh semua pihak baik itu *stakeholder*, yaitu Pemerintah Daerah Situbondo, pihak swasta dan pihak masyarakat. Diperlukan kemauan yang keras dalam mengembangkan budidaya kerapu di Kabupaten Situbondo, dan faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu tersebut (Ajzen, 1991). Kemauan dari individu-individu inilah yang akan mewujudkan menjadi perilaku. Perubahan dan kesamaan niat dibutuhkan pengembangan budidaya perikanan kerapu di Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian Mukflihati (2010) disebutkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu golongan masyarakat yang dianggap miskin secara absolut di Indonesia, termasuk studi yang dilakukan oleh Kusnadi (2000), yang menyatakan bahwa nelayan *small scale fishery* berada pada tingkat

marjinal. Jika dibandingkan dengan nelayan artisanal, maka nelayan pembudidaya dan pembenih Ikan Kerapu, lebih baik secara latar belakang pendidikan dan strata sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan budidaya dan pembenihan ikan memerlukan kemampuan dengan penguasaan teknologi tertentu, sehingga seharusnya lebih siap dalam menghadapi perubahan, termasuk perubahan dalam perdagangan bebas.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Menguji pengaruh faktor sumberdaya manusia terhadap *attitude toward*, *subjective norm* dan *perceived behavior control* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
2. Menguji pengaruh dukungan teknologi terhadap *attitude toward* dan *subjective norm* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
3. Menguji pengaruh komitmen pimpinan terhadap *subjective norm* pada komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
4. Menguji pengaruh regulasi terhadap *subjective norm* dan *perceived behavior control* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
5. Menguji pengaruh resistensi perubahan terhadap *attitude toward* dan *subjective norm* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
6. Menguji pengaruh faktor pembiayaan dari lembaga keuangan formal terhadap *attitude toward*, *subjective norm* dan *perceived behavior control* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas
7. Menguji pengaruh *attitude toward*, *subjective norm* dan *perceived behavior control* pada pengembangan komoditas kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas

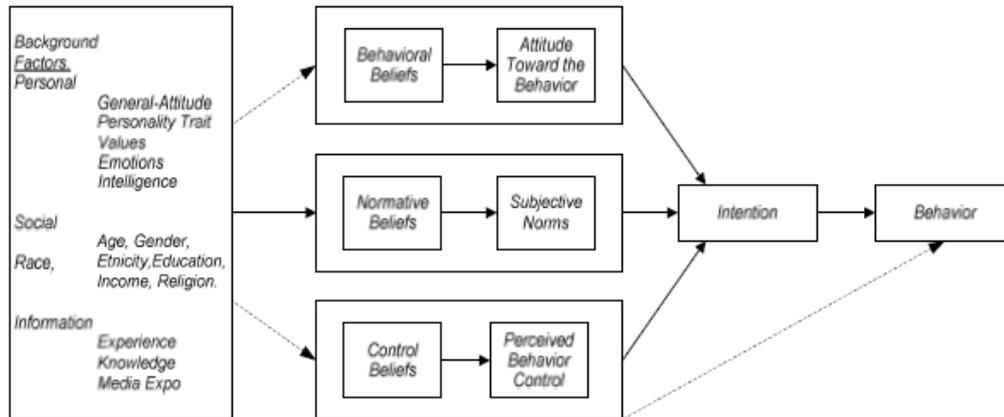
Tantangan Kesiapan Stakeholder pada Implementasi Perdagangan Bebas

Dalam menghadapi perdagangan bebas (MEA) yang dimulai pada awal tahun 2016, salah satu hal yang paling sulit dihindari adalah persaingan yang semakin tajam. Hal ini dikarenakan pesaing budidaya Ikan Kerapu bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, seperti China dan Jepang. Meskipun negara-negara lain banyak mengadopsi teknologi budidaya yang dipakai oleh Indonesia, bukan tidak mungkin negara pengadopsi akan mengimplementasikannya jauh lebih baik daripada Indonesia. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan penerapan SNI melalui sertifikasi mendesak untuk dilakukan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sumber daya manusia, pembiayaan, pemasaran, dan regulasi dari unsur teknis pemerintah yang harus dipersiapkan juga oleh *stakeholder* terkait.

Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan era perdagangan yang baru untuk wilayah Asean, khususnya pada *stakeholder* budidaya Ikan Kerapu, tidak lepas dari peran satuan kerja pemerintah dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut beserta seluruh *stakeholder*, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, pelatihan yang diberikan, dukungan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan. Selain itu faktor regulasi, resistensi perubahan, dan *intention* berpengaruh besar pula dalam mengukur kesiapan implementasi perdagangan bebas 2015. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur yang menyampaikan hasil penelitian mengenai kesiapan *stakeholder* dalam menghadapi peraturan maupun sistem baru seperti yang dilakukan oleh Ardiansyah (2013), Kusuma (2013) dan Kurnianingsih (2014). Sedangkan penelitian mengenai kesiapan dalam menghadapi perubahan peraturan yang menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen dilakukan oleh Kurnianingsih (2014) dan Prihandoko et.al (2012), Penelitian dalam bidang kelautan dan perikanan yang mengukur perilaku nelayan dilakukan oleh Prihandoko et.al (2012) yang mengungkapkan bahwa perspektif *Theory of Planned Behavior* dapat dipergunakan untuk melihat niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Penggunaan *Theory of Planned Behavior* untuk Menilai Kesiapan Implementasi Perdagangan Bebas

Pendekatan *Theory of Planned Behavior* akan dipergunakan pada usulan penelitian ini untuk menilai kesiapan implementasi perdagangan bebas. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Ajzen (1991), menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Chau dan Hu, 2002). Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja, tetapi juga termasuk di dalamnya persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya, yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*). Secara lebih lengkap, Ajzen (2005) menambahkan faktor latar belakang individu ke dalam TPB, sehingga secara skematik TPB digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Theory of planned behavior (Ajzen, 2005)

Model teoritik dari *Theory of Planned Behavior* (perilaku yang direncanakan) mengandung berbagai variabel yaitu (Kurnianingsih, 2014):

Attitude toward behavior merupakan tendensi psikologis yang diekspresikan melalui derajat ketika seseorang melakukan evaluasi yang bersifat *favourable* atau tidak atas perilakunya (Robert, 2008). Perasaan *favourable* atau tidak dikaitkan dengan penerimaan seorang terhadap stimulus dari suatu objek yang dinilainya (Ajzen, 1991).

Subjective norm behavior merupakan norma subyektif yang mempengaruhi perilaku, dan kontrol berperilaku yang dirasakan. Menurut Azjen (1985), sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif dalam melakukan perilaku. Sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang mempunyai evaluasi yang baik atau yang kurang baik tentang perilaku tertentu. Norma subyektif menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, sedangkan kontrol berperilaku yang dirasakan menunjukkan mudah atau tidaknya seseorang melakukan tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu disamping halangan atau hambatan yang terantisipasi. *The Theory of Reasoned Action* juga telah digunakan pada banyak penelitian tentang sistem informasi, yang kebanyakan digunakan sebagai dasar dalam penelitian mengenai penerimaan pengguna dan model penerimaan teknologi/TAM (Davis, 1989).

Perceived Behavior Control merupakan tingkat kepercayaan seseorang bahwa dalam menggunakan suatu sistem akan terbebas dari usaha (Davis, 1989). Perilaku penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi seseorang bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan bermanfaat (Lee, et.al. 2001). Persepsi bahwa suatu teknologi mudah digunakan ditentukan oleh karakteristik teknologi dan karakteristik penggunanya (Brown, 2002).

Intention merupakan suatu kekuatan dari perhatian seseorang untuk menggunakan sesuatu (Fishbein & Ajzen dalam Chan et.al., 2001). Perhatian untuk menggunakan ditunjukkan oleh interaksi seseorang dengan suatu

media baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendorong untuk mengoperasikan suatu aplikasi.

Teori perilaku yang bisa digunakan untuk meramalkan perilaku individu, menurut Rochmawati (2013), Lee (2008), Sihombing (2004), adalah dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan Ajzen (1991), yang merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Arniati (2009) juga menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana merupakan salah satu model psikologi sosial yang sering digunakan untuk meramalkan perilaku. Teori Perilaku Terencana merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. Atas dasar inilah peneliti memilih untuk menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) untuk menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi perdagangan bebas pada komoditas Ikan Kerapu. Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan menurut Ajzen (1991) niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior*).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini dalam membangun hipotesis:

Prihandoko et.al (2012)

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa perspektif *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk melihat niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan artisanal di Indonesia. Selain itu, dinyatakan bahwa niat untuk berperilaku nelayan terwujud sesuai dengan perilaku mereka dalam kegiatan perikanan tangkap, khususnya pada variabel karakteristik demografi.

Kurnianingsih (2014)

Melalui penelitiannya, yang dalam hal ini peneliti mengambil asumsi bahwa kedua penelitian ini sama dalam hal ingin menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan implementasi suatu sistem tertentu, yaitu perdagangan bebas melalui implementasi MEA dan implementasi SAP berbasis akrual, disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap *attitude toward* pada kesiapan implementasi SAP berbasis akrual, tetapi tidak pada *subjective norm* dan *perceived behavior*. Faktor dukungan teknologi berpengaruh terhadap *subjective norm* tetapi tidak pada *attitude toward*. Faktor komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap *subjective norm*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap *subjective norm* dan *perceived behavior* pada kesiapan implementasi SAP berbasis akrual. Pada penelitian ini pengendalian oleh pemerintah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.02/MEN/2007, yang dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi teknis Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor Kep.44/DJ-PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi CBIB. Sedangkan faktor resistensi perubahan berpengaruh positif terhadap *attitude toward* dan *subjective norm*. Faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam implementasi SAP berbasis akrual adalah faktor *attitude toward* dan *perceived behavior*. Faktor terbesar yang mempengaruhi *Intention* adalah *attitude toward*.

Ardiyansyah (2013)

Dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor sumber daya manusia dan komunikasi mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Rahab et.al (2012)

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa niat wirausahawan muda untuk mengajukan pinjaman ke bank secara signifikan dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku. Sedangkan ketika diukur, maka lebih tinggi perilaku wirausahawan muda di masa lalu daripada niat mereka untuk mengajukan pinjaman kepada bank. Variabel inilah yang akan ditambahkan untuk diukur dalam penelitian ini, karena pembiayaan dari lembaga keuangan formal sangat membantu dalam pengembangan bisnis pada sektor mikro, sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan dikeluarkannya keputusan kementerian terkait yang membidangnya dan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM (Saeroji, et.al, 2015).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka hipotesis dapat dibangun sebagai berikut :

- H1a: Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap *attitude toward* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H1b: Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H1c: Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap *perceived behavior control* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN

- H2a: Faktor dukungan teknologi berpengaruh terhadap *attitude toward* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H2b: Faktor dukungan teknologi berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H3: Faktor komitmen pimpinan berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H4a: Faktor regulasi berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H4b: Faktor regulasi berpengaruh terhadap *perceived behavior control* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H5a: Faktor resistensi perubahan berpengaruh terhadap *attitude toward* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H5b: Faktor resistensi perubahan berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H6a: Faktor pembiayaan dari lembaga keuangan formal berpengaruh terhadap *attitude toward* kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H6b: Faktor pembiayaan dari lembaga keuangan formal berpengaruh terhadap *subjective norm* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H6c: Faktor pembiayaan dari lembaga keuangan formal berpengaruh terhadap *perceived behavior control* pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H7a: Faktor *attitude toward* berpengaruh pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H7b: Faktor *subjective norm* berpengaruh pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN
- H7c: Faktor *perceived behavior control* berpengaruh pada kesiapan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT komoditas Ikan Kerapu dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian survey yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Sekaran, 2003). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu pembudidaya KJA dan pembenih HSRT Ikan Kerapu di Kabupaten Situbondo. Sedang sampel atas dalam permodelan SEM ini dihitung dengan mendasarkan pada pendapat Stevens (1996), bahwasanya ukuran sampel untuk estimasi Maximum Likelihood harus minimal 15 kali dari jumlah variabel yang diamati. Berdasarkan informasi tersebut, maka yang akan diambil sebagai sampel adalah seluruh nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT di seluruh Kabupaten Situbondo dengan jumlah responden sebesar 114 responden. Data ini diperoleh dari Laporan Penyusunan Data Kelautan dan Perikanan, Dinas DKP, Kabupaten Situbondo (2015).

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan penelitian Kurnianingsih (2014) variabel diukur menggunakan model skala *Rating* empat poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju dan (4) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka sesungguhnya. *Rating Scale* adalah data kuantitatif (angka) yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Seperti halnya dengan skala lain, dalam *Rating Scale* responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. *Rating Scale* lebih fleksibel, tidak saja untuk mengukur sikap, tetapi dapat juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, iptek, instansi dan lembaga, kepuasan pelanggan, produktivitas kerja dan lainnya.

Untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (independen). Menurut Mudrajat (2003) variabel eksogen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel endogen nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen yaitu sumber daya manusia (X_1), dukungan teknologi (X_2), komitmen pimpinan (X_3), regulasi (X_4), dan resistensi perubahan (X_5), dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (X_6).

Menurut Mudrajad (2003) variabel endogen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah *intention*, yaitu Kesiapan Menghadapi Perdagangan Bebas (Y), Sedangkan variabel intervening menurut Sugiyono (2007) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara variabel dependen dengan variabel independen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah *attitude toward behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavior*.

Pengukuran Kualitas Data

Dalam menganalisis data digunakan metode kuantitatif, kuesioner yang telah diisi responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program *SmartPLS ver 3 for Windows*. Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data yang dikumpulkan (Kurnianingsih, 2014).

Pengolahan Data

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan PLS (*Partial Least Square*) yang merupakan pendekatan alternative dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian (Gozali, 2006). SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori, sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Dalam permodelan dengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi bahwa pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi (Jogiyanto dan Willy, 2009).

Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Dengan metode PLS maka model yang diuji dapat mempergunakan asumsi-asumsi seperti data tidak harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio, jumlah sampel tidak harus besar, indikator tidak harus dalam bentuk refleksif (dapat berupa indikator refleksif dan normatif), dan model tidak harus berdasarkan pada teori (Gozali, 2006). PLS merupakan sebuah metode alternatif ketika terdapat hubungan antar variabel yang kompleks, seperti pada SEM, tetapi ukuran sampel datanya kecil (30 sampai 100), sedangkan

menurut Hair et.al. (2010), SEM harus menggunakan ukuran sampel data minimal 100.

Dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Gozali, 2006). Untuk pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat besarnya nilai t-statistik. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah 1.64, dimana apabila nilai t berada kurang dari 1.64 (<1.64) maka hipotesis akan ditolak. Hipotesis alternatif yang dinyatakan dalam penelitian ini diterima pada tingkat signifikansi 5% (lima persen). Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R-square* (R^2) antara 1 dan nol, dimana nilai *R-square* (R^2) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Gozali, 2006).

Model Spesifikasi

Model dalam penelitian ini adalah struktural, indikator penelitian reflektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keramba Jaring Apung (KJA) dan *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) Komoditas Ikan Kerapu di Kabupaten Situbondo

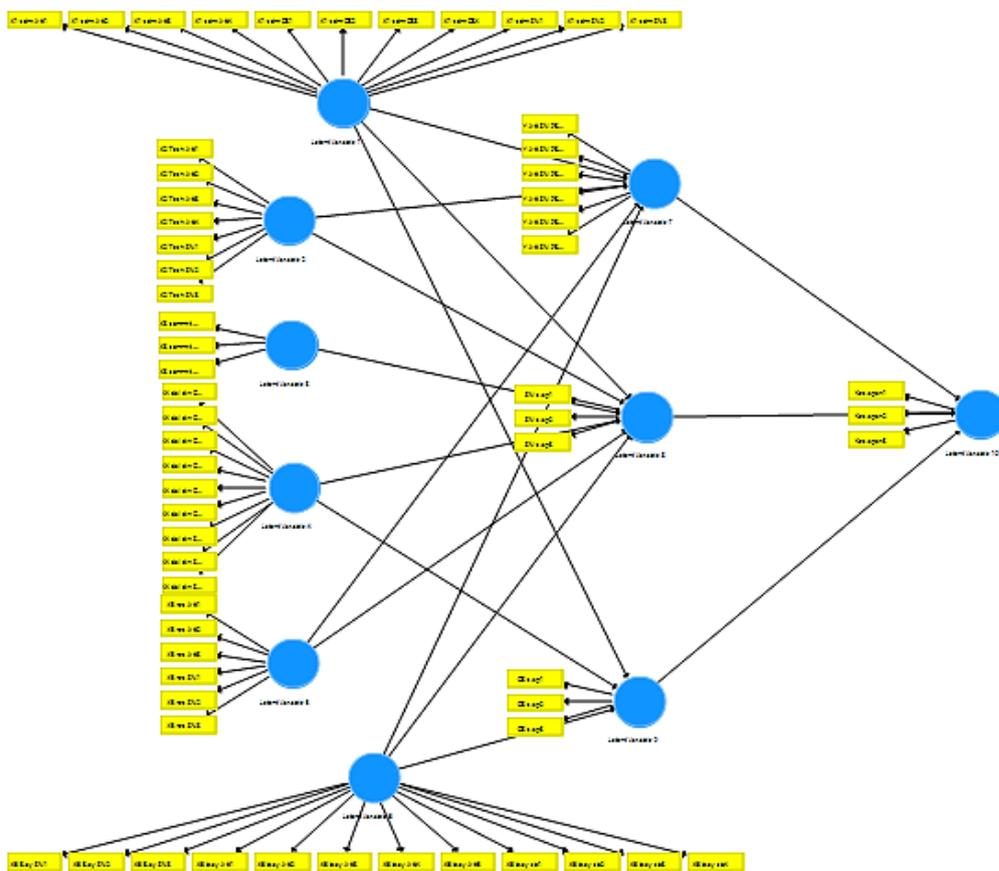
Nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT di Kabupaten Situbondo tersebar di sepanjang Kecamatan Banyuglugur sampai dengan Kecamatan Banyuputih, dengan hasil ikan kerapu terbaik ada di pos-pos Banyuputih, Gelung-Panarukan, Bungatan, dan Klatakan-Kendhit. Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo ini merupakan pusat penelitian dari seluruh dunia, termasuk di antaranya Propinsi Bali karena penguasaan teknologi oleh nelayan dan pembenih, ditunjang dengan musim tropis yang sesuai untuk pembudidayaan dan pembenihan ikan.

Era perdagangan bebas MEA telah mendapat respon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2016 telah dilakukan penatalaksanaan berbagai aturan dalam bidang perikanan dan kelautan, melalui Peraturan Menteri-KP No. 15/2016. Salah satu kebijakannya adalah untuk mencegah *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* sehingga kapal-kapal logistik dipermudah persyaratannya agar dapat lebih banyak mengangkut ikan hidup, seperti ikan kerapu. Selain itu tatacara penggunaan alat tangkap ikan dan aturan mengenai ikan budidaya juga diatur secara jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdagangan gelap, meskipun justru biaya produksi yang dikeluarkan oleh nelayan ikan hidup menjadi lebih besar karena ketidaksiapan armada pemerintah yang disebabkan karena masih kurangnya armada dan kecilnya jumlah pelabuhan muat singgah yang

diizinkan bagi kapal pengangkut ikan hidup. Dengan permasalahan ini, maka tujuan keterangkutan ikan hidup menjadi tidak tercapai. Kemudian pada bulan September 2016, melalui Inpres No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, telah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, termasuk untuk mengatasi masalah-masalah pengangkutan ikan hidup.

Hasil Analisis Data

Pada penelitian ini menguji faktor-faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi (T), Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan (KMP), Regulasi (R), Resistensi Perubahan (RSP), dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Formal (LK) dengan variabel intervening yaitu *Attitude Toward* (ATT), *Subjective Norm* (SNM), dan *Perceived Behaviour* (CBH) berpengaruh terhadap *Intention* (ITN) kesiapan pembudidaya KJA ikan kerapu dan pembenih HSRT untuk menghadapi perdagangan bebas di Kabupaten Situbondo. Hasil Pengujian pertama dengan SmartPLS ini dilakukan dengan menilai Model Struktural, dapat dilihat pada dibawah ini:



Gambar 4. Model struktural

Analisa Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) adalah mengukur korelasi antara indikator dengan konstruk/variabel laten. Dengan mengetahui korelasinya maka akan diketahui validitas dan reliabilitas sebuah model. Untuk mengukur validitas dan reliabilitas konstruk dilakukan dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas konstruk (Ghozali,2008).

Uji Validitas (Keseluruhan)

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji apakah setiap butir pertanyaan dapat mengungkapkan variabel yang diteliti, dalam penelitian ini validitas menggunakan alat analisis dengan *SmartPLS*. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0.5 (>0.5) terhadap konstruk yang dituju. Pada penelitian ini sebanyak 35 (tiga puluh lima) dari 63 (enam puluh tiga) atau 55.56% indikator dinyatakan tidak valid. Hal ini banyak disebabkan karena tingkat pemahaman responden terhadap kuesioner yang sangat berbeda dengan responden dari kuesioner adopsian yang disusun Kurnianingsih (2014), meskipun sebenarnya tingkat pendidikan responden penelitian ini cukup baik. Latar belakang budaya masyarakat pesisir utara Jawa Timur (pandalungan) yang cenderung ekspresif, terbuka, keras, dan tidak suka berbasabasi tentunya sangat erat kaitannya dengan cara mereka menjawab kuesioner (Sutarto, 2006). Tidak adanya ketelatenan responden, mengingat pertanyaan dalam kuesioner relatif banyak, dengan cara menjawab yang sangat cepat cenderung terburu-buru, menyebabkan banyak pertanyaan dalam kuesioner menjadi tidak valid sebagai indikator.

Berdasarkan hasil estimasi terakhir yang digambarkan pada model PLS gambar 4.2, maka dapat dibuat hasil persamaan moderasi sebagai berikut :

$$ATT (\eta 1) = -0.080 x_1 + 0.121X_2 + 0.432X_5 + 0.341X_6$$

$$SNM (\eta 2) = 0.214 x_1 + 0.414X_2 - 0.044X_3 - 0.296X_4 - 0.067X_5 + 0.470X_6$$

$$CBH (\eta 3) = -0.323X_1 + 0.428X_4 + 0.393X_6$$

$$ITN (\eta 4) = 0.174\eta_1 + 0.347\eta_2 + -0.515\eta_3$$

Lebih lanjut indikator reflektif juga perlu diuji *discriminant validity* atau dengan melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant *validity* yang baik (Ghozali, 2006). Nilai yang diharapkan adalah diatas 0.5 (>0.5). Berikut ini adalah nilai AVE dalam penelitian ini.

Tabel 2. AVE (Average Variance Extracted)

KONSTRUK	AVE	\sqrt{AVE}
ATTITUDE	1.000	1.000
KESIAPAN	0.668	0.817
KOMITMEN	0.490	0.700
PEMBIAYAAN	0.504	0.710
PERCEIVED	0.435	0.660
REGULASI	0.281	0.530
RESISTENSI	0.683	0.826
SDM	0.439	0.663
SUBJECTIVE	0.438	0.662
TEKNOLOGI	0.501	0.708

Tabel diatas memberikan nilai \sqrt{AVE} diatas 0.5 untuk semua konstruk. Sedangkan nilai terendah AVE adalah sebesar 0.530 pada konstruk Regulasi.

Uji Reliabilitas (Keandalan)

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika diatas 0.7 (>0.7) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah *reliable* atau memenuhi uji reliabilitas (Ghozali, 2010). Berikut ini nilai *composite reliability* pada output:

Tabel 3. Composite reliability

KONSTRUK	Composite Reliability
ATTITUDE	1.000
KESIAPAN	0.856
KOMITMEN	0.266
PEMBIAYAAN	0.833
PERCEIVED	0.259
REGULASI	0.609
RESISTENSI	0.807
SDM	0.696
SUBJECTIVE	0.568

TEKNOLOGI

0.749

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* tidak semua konstruk adalah diatas 0.7 (>0.7) yang menunjukkan bahwa tidak semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi *criteria discriminant validity* atau reliabel. Konstruk yang dinilai reliabel adalah attitude, kesiapan, pembiayaan, resistensi, sumber daya manusia, dan teknologi.

Analisa Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikutnya dilakukan pengujian model struktural (*Inner Model*). Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu *R-Square* pada konstruk endogen. Nilai *R-square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Gozali (2010) Nilai *R-Square* 0,7 (kuat), 0.5 (moderat) dan 0.25 (lemah). Berikut adalah nilai *R-Square* pada konstruk:

Tabel 4. R-Square

KONSTRUK	R Square
ATTITUDE	0.566
KESIAPAN	0.289
KOMITMEN	--
PEMBIAYAAN	--
PERCEIVED	0.688
REGULASI	--
RESISTENSI	--
SDM	--
SUBJECTIVE	0.400
TEKNOLOGI	--

Tabel di atas memberikan nilai 0.566 untuk konstruk Attitude, 0.289 untuk konstruk Kesiapan, 0.400 untuk konstruk Subjective, 0.688 untuk konstruk Perceived. Dengan demikian konstruk Perceived termasuk kategori kuat, untuk konstruk Attitude dan Subjective masuk dalam kategori moderat, dan Kesiapan berada pada kategori rendah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam SmartPLS didasarkan pada nilai yang terdapat pada *structural model*, tingkat signifikansi *path coefficient* didapat dari nilai *t* dan *standardized path coefficient*. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik *t* (uji satu sisi). Batas nilai atau *threreshold* pengujian hipotesis yaitu: nilai *t* muatan *factor loadings* lebih besar dari nilai kritis (> 1.64), sedang nilai *standardized path coefficient* (*p*) >0.05 untuk nilai *p* digunakan untuk menilai korelasi dalam formulasi yang

dihipotesiskan apakah ada hubungan atau tidak. Pada penilaian t-statistik jika lebih besar dari 1.64 (>1.64) maka hipotesis akan diterima (Gozali,2006). Hasil analisis pada penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. Path coefficients

	Original Sample	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O)	P Values
ATTITUDE -> KESIAPAN KOMITMEN	0.174	0.190	0.193	0.898	0.185
DINAS -> SUBJECTIVE NORM	-0.044	0.008	0.216	0.203	0.420
PEMBIAYAAN FORMAL -> ATTITUDE	0.314	0.325	0.142	2.406	0.008
PEMBIAYAAN FORMAL -> PERCEIVED BEHAVIOR	0.393	0.400	0.116	3.387	0.000
PEMBIAYAAN FORMAL -> SUBJECTIVE NORM	0.470	0.412	0.232	2.023	0.022
PERCEIVED BEHAVIOR -> KESIAPAN	-0.515	-0.535	0.214	2.405	0.008
REGULASI -> PERCEIVED BEHAVIOR	0.428	0.422	0.116	3.681	0.000
REGULASI -> SUBJECTIVE NORM	-0.296	-0.220	0.273	1.083	0.140
RESISTENSI PERUBAHAN -> ATTITUDE	0.432	0.458	0.141	3.072	0.001
RESISTENSI PERUBAHAN -> SUBJECTIVE NORM	-0.067	-0.050	0.236	0.283	0.389
SDM -> ATTITUDE	-0.080	-0.063	0.125	0.638	0.262
SDM -> PERCEIVED BEHAVIOR	-0.323	-0.301	0.120	2.695	0.004
SDM -> SUBJECTIVE NORM	0.214	0.267	0.214	0.999	0.159
SUBJECTIVE NORM -> KESIAPAN	0.347	0.359	0.178	1.957	0.025
TEKNOLOGI -> ATTITUDE	0.121	0.116	0.145	0.835	0.202
TEKNOLOGI -> SUBJECTIVE NORM	0.414	0.331	0.245	1.686	0.046

Tabel diatas menunjukkan sifat korelasi antar konstruk (positif/negatif). Dari hasil *path coefficient* diatas dapat dilihat bahwa nilai T-Statistik yang dihasilkan jika lebih 1.64 menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima dan jika kurang dari 1.64 hipotesis dinyatakan ditolak. Secara garis besar hasil uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini melalui hasil pengujian dengan menggunakan PLS adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil pengujian hipotesi

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)	Ha Didukung/Tidak Didukung
SDM -> ATT	-0.080	0.638	Tidak Didukung
SDM -> SNM	-0.323	0.999	Tidak Didukung
SDM -> CBH	0.214	2.695	Didukung
T -> ATT	0.121	0.835	Tidak Didukung
T -> SNM	0.414	1.686	Didukung
KOMT -> SNM	-0.044	0.203	Tidak Didukung
REG -> SNM	-0.296	1.083	Tidak Didukung
REG -> CBH	0.428	3.681	Didukung
RES -> ATT	0.432	3.072	Didukung
RES -> SNM	-0.067	0.283	Tidak Didukung
PEMBY -> ATT	0.341	2.406	Didukung
PEMBY -> SNM	0.470	2.023	Didukung
PEMBY -> CBH	0.393	3.387	Didukung
ATT -> ITN	0.174	0.898	Tidak Didukung
SNM -> ITN	0.347	1.957	Didukung
CBH -> ITN	-0.515	2.405	Didukung

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan nilai *original sample estimate* maka diperoleh bahwa nilai tertinggi yang mempengaruhi *Intention* (ITN) Kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah pada *Subjective Norm* (SNM) yaitu sebesar 0.347. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Perilaku atau *Subjective Norm* (SNM) dalam menerima sebuah sistem perdagangan baru mempunyai pengaruh terhadap Kesiapan lebih tinggi daripada Sikap (*Attitude Toward*) maupun Kontrol Perilaku (*Perceived Behaviour Control*). Sedangkan variabel yang tidak dominan adalah Kontrol Perilaku (*Perceived Behaviour Control*) terhadap *Intention* Kesiapan (-0.515), SDM terhadap Kontrol Perilaku (-0.323), Regulasi terhadap *Subjective Norm* (-0.296), SDM terhadap *Attitude Toward* (-0.080), Resistensi Perubahan terhadap *Subjective Norm* (-0.067), dan Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap *Subjective Norm* (-0.044).

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Faktor Sumber Daya Manusia Terhadap *Attitude Toward*, *Subjective Norm* Dan *Perceived Behaviour Control* Pada Kesiapan Menghadapi Perdagangan Bebas

Pengujian pengaruh variabel pada faktor sumber daya manusia (SDM) terhadap *Attitude Toward* (sikap), *Subjective Norm* (dukungan) dan *Perceived Behaviour Control* (kontrol) dalam menerima kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas diperoleh hasil bahwa SDM rata-rata merasa belum siap menerima dan menghadapi perdagangan bebas, yang kemungkinan dikarenakan latar belakang pendidikan yang sebagian besar bukan berasal dari bidang ilmu perikanan dan kekhawatiran yang muncul atas evaluasi negatif yang dibuatnya sendiri dalam menghadapi perubahan. Dalam penelitian ini hanya faktor *Perceived Behaviour Control* yang berpengaruh secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap nelayan pembudidaya dan pembenih HSRT menunjukkan ketidaksiapan dalam menghadapi perdagangan bebas, tetapi secara control perilaku, mereka mampu mengatasinya karena pada dasarnya teknologi perekayasaan sudah dikuasai dan kepercayaan diri atas kondisi geografis yang mendukung menjadikan mereka merasa bahwa mereka mampu bersaing di pasar Internasional.

Hubungan Antara Faktor Teknologi Terhadap *Attitude Toward* Dan *Subjective Norm* Pada Kesiapan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Hipotesis pada faktor teknologi terhadap *attitude toward* tidak didukung, tidak didukungnya hipotesis tersebut dikarenakan sikap individu masing-masing nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT belum siap untuk memahami sebuah teknologi perekayasaan untuk kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas. Sedangkan hipotesis faktor teknologi terhadap *subjective norm* (perilaku dukungan), hipotesis tersebut didukung. Dukungan teknologi terhadap *subjective norm* tersebut yaitu seluruh prosedur dan teknologi pada dasarnya telah disiapkan pemerintah, tetapi sumber daya manusia yang menjalankan teknologi tersebut belum siap untuk mengimplementasikan karena belum adanya pelatihan-pelatihan, khususnya demi mendukung kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas.

Hubungan Antara Faktor Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap *Subjective Norm* Pada Kesiapan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Hipotesis Faktor Komitmen Dinas terhadap *Subjective Norm* pada kesiapan implementasi dinyatakan tidak didukung. Tidak didukungnya hipotesis tersebut dikarenakan bahwa dukungan yang kuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap perubahan kemungkinan belum dilakukan dengan baik atau maksimal. Seperti dikemukakan dalam teori oleh P. Robbins (2003)

yang menyatakan bahwa pimpinan, dalam hal ini pemerintah adalah orang yang menetapkan arah dengan menyatukan suatu visi terhadap masa depan, kemudian menyatukan orang dengan mengkomunikasikan visi tersebut dalam mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan.

Dimensi Pimpinan dikemukakan oleh Allen dan Mayer dalam Sangadji (2009), yaitu: a) Komitmen efektif yaitu tingkat seberapa jauh seseorang Dinas Kelautan dan Perikanan secara emosi terikat, mengenal dan terlibat dalam organisasi, b) Komitmen berkelanjutan yaitu suatu penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi, c) Komitmen normatif merujuk kepada tingkat seberapa jauh seseorang secara psikologi terkait untuk menjadi bagian dari organisasi yang didasarkan pada perasaan seperti kesetiaan, afeksi, kepemilikan, kebanggaan. Kesimpulan dari hipotesis tersebut diperoleh bahwa komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan akan terbentuk jika peraturan perundangan, kebijakan dan dukungan pada anggaran yang mendukung dalam menghadapi perdagangan bebas direncanakan dengan baik dan senantiasa mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait melalui proses sosialisasi yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran sehingga menimbulkan dukungan dalam menjalankan implementasi dengan baik. Pendampingan kepada nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT justru lebih banyak dilakukan oleh BBAP, dan bukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Hubungan Antara Regulasi Terhadap *Subjective Norm* Dan *Perceived Behaviour Control* Terhadap Kesiapan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Hipotesis ini didukung pada kontrol perilaku sedangkan pada dukungan sikap ditolak. Tidak didukungnya Regulasi pada *subjective norm* (dukungan sikap) karena regulasi belum cukup mendapat dukungan. Pertentangan terjadi justru karena adanya berbagai perubahan besar yang terdapat pada UU No. 15 Tahun 2016. Sedangkan pada kontrol perilaku dikatakan didukung hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah telah siap dengan seluruh evaluasi maupun dokumentasi yang juga sudah didukung pengawasan yang baik.

Hubungan Antara Resistensi Perubahan Terhadap *Attitude Toward* Dan *Subjective Norm* Pada Kesiapan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Hipotesis faktor resistensi perubahan terhadap sikap dinyatakan didukung, tetapi tidak pada dukungan sikap. Resistensi perubahan ini sebagai kecenderungan bagi nelayan pembudidaya dan pembenih HSRT untuk tidak ingin menjalankan perubahan baik dikarenakan ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui ataupun kesulitan organisasional. Sedangkan secara dukungan sikap, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya telah menyiapkan berbagai alternatif pemecahan pada masalah perdagangan bebas.

Hubungan Antara Pembiayaan Lembaga Keuangan Formal Terhadap *Attitude Toward, Subjective Norm, Dan Perceived Control Behaviour* Pada Kesiapan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Hipotesis faktor pembiayaan dinyatakan didukung untuk ketiga variabel intervening. Pada variabel sikap bahwasanya pembiayaan akan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT dalam mendukung usahanya. Pembiayaan dari lembaga keuangan formal menuntut adanya syarat-syarat dokumen maupun kinerja usaha yang baik, sehingga ketika terdapat lembaga keuangan formal yang mendanai, maka artinya usaha tersebut telah dipercaya, dan dengan dana pinjaman tentunya usaha akan semakin berkembang. Hal inilah yang mendorong adanya sikap yang positif dari nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT.

Variabel dukungan sikap juga mendukung pada hipotesis ini dikarenakan pada usaha UMKM yang dijalankan nelayan pembudidaya dan pembenih HSRT ini, pelaporan keuangan telah dilakukan secara baik, karena karyawan yang bekerja, selain gaji, mereka juga diberi honorarium yang ditentukan dari kapasitas produksi per bulannya, sehingga secara otomatis laporan akan disusun secara baik dan teliti, seperti yang diminta pihak lembaga keuangan formal. Nelayan pembudidaya KJA dan HSRT juga telah menyusun laporan keuangan, menghitung omzet, harga pokok, dan tentunya rencana bisnis. Dengan kondisi seperti ini tentunya timbul tingkat kepercayaan bahwa melalui lembaga keuangan formal akan mendukung kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas.

Kontrol perilaku juga mendukung hipotesis ini karena nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT mempercayai bahwa melalui pembiayaan lembaga keuangan formal, kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan dalam perdagangan bebas akan meningkat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini diambil dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan yaitu bahwa Faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap *perceived behavior*, dengan demikian hipotesis H1c yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap *perceived behavior* pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas terbukti kebenarannya dengan demikian hipotesis H1c didukung. Sedangkan pada faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap *attitude toward* dan *subjective norm*, dengan demikian pernyataan hipotesis H1a dan H1b tidak terbukti atau hipotesis tidak didukung. Faktor teknologi tidak berpengaruh terhadap *attitude toward*, dengan demikian hipotesis H2a yang menyatakan bahwa dukungan teknologi berpengaruh positif terhadap *attitude toward* pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas tidak

terbukti kebenarannya. Sedangkan dukungan teknologi terhadap *subjective norm* terbukti berpengaruh positif, sehingga hipotesis H2b dinyatakan didukung. Faktor Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berpengaruh terhadap *subjective norm*, dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan bahwa Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan berpengaruh positif terhadap *subjective norm* dinyatakan tidak didukung.

Faktor Regulasi tidak berpengaruh terhadap *subjective norm*, sehingga hipotesis H4a tidak didukung. Sedangkan Regulasi berpengaruh positif terhadap *perceived behavior* pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas, dengan demikian hipotesis H4b dinyatakan didukung. Faktor Resistensi Perubahan berpengaruh positif terhadap *attitude toward* dan *subjective norm* pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas, dengan demikian hipotesis H5a dan H5b dinyatakan diterima. Faktor Pembiayaan Lembaga Keuangan Formal berpengaruh positif terhadap *attitude toward*, *subjective norm*, *perceived behavior control* pada kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas, dengan demikian maka hipotesis H6a, H6b, dan H6c dinyatakan didukung.

Faktor *Intention* dipengaruhi secara positif oleh *subjective norm* dan *perceived control behavior*, dan tidak dipengaruhi oleh *attitude toward*. Dari pengolahan data diperoleh informasi bahwa nilai tertinggi yang mempengaruhi *intention* adalah pada *perceived control behavior* yaitu sebesar 0.347, hal ini menunjukkan bahwa kontrol pada sikap terhadap kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas memberikan pengaruh yang terbesar di antara variabel lainnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa keberhasilan dalam menerima kesiapan dalam implementasi sebuah sistem yang akan dilakukan khususnya dalam menghadapi perdagangan bebas, maka harus memfokuskan pada konstruk sumber daya manusia dalam kontrol perilaku yang fokus pada persepsi nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan bagi pelaku usaha komoditas ikan kerapu ini perlu semakin ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

Kekurangan pada konstruk teknologi terletak pada sikap pelaku usaha pada komoditas ikan kerapu terhadap teknologi yang mendukung usahanya, meskipun secara normatif disadari bahwa teknologi mampu memberikan dukungan. Regulasi pada dukungan perilaku terhadap kesiapan menghadapi perubahan, dan yang terpenting yaitu resistensi terhadap perubahan harus benar-benar diperhatikan karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kesiapan dalam menghadapi perdagangan bebas yang telah berlangsung, utamanya dengan reformasi pada sektor kelautan dan perikanan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Faktor pembiayaan dari lembaga keuangan formal memiliki pengaruh terhadap ketiga variabel intervening, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses dana untuk mendukung usaha pada

komoditas ini harus benar-benar ada dan luas cakupannya, dan pemerintah daerah sangat berkepentingan dalam ini.

Faktor Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan masih lemah sehingga harus diperhatikan karena kunci keberhasilan dari perubahan adalah Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan harus selalu memberikan informasi dan sosialisasi terhadap segala keterbaruan teknologi perekayasaan dan peraturan perundang-undangan, mengingat selama ini pendampingan justru lebih banyak dilakukan dari pihak BBAP.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) Model struktural yang dibentuk adalah model pengembangan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2001) sehingga model hanya bisa bersifat eksplanasi tidak bisa bersifat konfirmasi teori hubungan antara variabel, selain juga karena kurang didukung dengan teori empiris yang kuat; (2) Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu informasi yang diambil berasal dari sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan yaitu nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT yang berada pada wilayah dengan hasil budidaya kerapu serta pembenihan terbanyak dan paling baik kualitasnya, yaitu Kecamatan Kendit, Bungatan, dan Panarukan, sehingga penelitian sangat bergantung pada jawaban masing-masing responden yang ada pada sampel penelitian, dan; (3) Jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas sebesar 43 responden, sehingga kemampuan untuk melakukan generalisasi guna mendapatkan gambaran Kesiapan nelayan pembudidaya KJA dan pembenih HSRT dalam menghadapi perdagangan bebas masih dipandang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1985. *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior, Action Control: From Cognition to Behavior*. J. Kuhl and J. Beckman, eds. Springer Verlag. New York. p11-39.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50(2), 179-211.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2nd edition. Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Ardiansyah, dan Sari Atmini. 2013. "Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No. 71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, www.jimfeb.ub.ac.id. diakses 1 Januari 2016.
- Arniati. 2009. "Peran Theory of Planned Behavior dan Etika Terhadap Ketaatan Pajak". <https://asp.trunojoyo.ac.id>

- Chan. 2001. *Determinants of Chinese Consumer's Green Purchase Behavior*. *Psychology & Marketing TOC Vol. 18 Issue April 4th* pp. 389-413.
- Chau & Hu. 2002. *Information Technology Acceptance by Individual Professionals: A Model of Comparison Approach*. *Decision Sciences Vol 32, No. 4*, pp. 699-719.
- Davis, F.D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*. Vol 13(3); 319-340.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 2016. Laporan Penyusunan Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling-Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., dan Anderson, R.E. 2010. *Multivariate Data Analysis*. 7th edition. NJ: Pearson Prentice Hall.
- Hartono, Jogiyanto, H.M. dan Willy, Abdillah. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurnianingsih, Widiyanti. 2014. "Analisis Kesiapan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dengan Menggunakan Pendekatan *Theory Planned Behaviour* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman". Universitas Islam Indonesia: Thesis, tidak dipublikasikan.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusuma. 2003. "Topik Penelitian Akuntansi Keperilakuan Dalam Jurnal Behavioral Research in Accounting (BRIA)". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 5 No. 2 Hal. 147-166.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Prihandoko, et.al. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Penyuluhan: September 2012 Vol. 8 No. 2*.
- Rahab, Patiro, S.P.S., Budiyanti, H. 2012. "Niat Wirausahawan Muda Untuk Mengajukan Pinjaman Ke Bank Sebagai Upaya Pengembangan Usaha: Sebuah Pengembangan *Theory of Planned Behavior*".
- Ramdhani, Neila. *Model Perilaku Penggunaan IT "NR-2007", Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (TAM)*.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri-KP No. 15 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hdup.
- Republik Indonesia. 2016. Instruksi Presiden No. 7 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
- Rochmawati, Sari. 2013. "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Persepsian Resiko, Persepsian Kebermanfaatan Terhadap Niat Penggunaan Kartu Kredit". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

- Saeroji, A., Maskur, A., Tjahjaningsih, E. 2015. "Pengaruh Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Pinjam KUR Mikro (Studi Pada Nasabah BRI Di Pati)". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U), Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. ISBN: 978-979-3649-81-8.
- Sekaran, Uma. 2003. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Terjemahan Yon, Kwan. 2007. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, S.O. 2004. *Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek: Komparasi antara Theory of Planned Behavior dan Theory of Trying*. Disertasi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Stevens, R.D. dan Edwards, A.D.N. 1996. "An Approach to the Evaluation of Assistive Technology". *Proceedings of Assets: Vancouver, ACM*, pp 64-71.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta
- Vekantesh dan Davis. 1996. "A Model of the Antecedents of Received Ease of Use: Development and Test". *Decision Sciences Vol.27, Issue 3 pg. 451-481*.